PENGANTAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
TGL. TERIMA Oktober 93.
SUMBER HARGA HD.
KOLEKSI KKI
INVENTARIS 810/Hd/93-p (2)
KLASIFIKASI 374 IRM-p

Oleh
DRA. IRMAWITA
DRS. SYAHRIL

Fakultas Ilmu Pendidikan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Padang
1992

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Disadari atas keperluan dan kepentingan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Padang, maka disusunlah buku ini dengan judul "PENGANTAR PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDKAN LUAR SEKOLAH". Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah di jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Padang.

Buku ini berisikan tentang pendidkan praktis dalam pengelolaan program pendidkan luar sekolah, yang ditinjau dari fungsi-fungsi pengelolaan itu sendiri, mengikuti penyusunan proram PLS, pelaksanaan program PLS dan pengawasan pengelolaan program PLS. Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pihak-pihak tersebut.

Akhir kata, dengan senang hati penulis menerima kritikan dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan dan pebaikan buku ini dimasa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Padang, Juli 1992

Penulis

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : KONSEP DASAR PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Kedudukan PLS dalam Sistem Pendidikan Nasional 1

B. Fungsi PLS dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional 2

C. Asas dan Karakteristik PLS 4

BAB II : PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Diagnosis Kebutuhan Belajar 8

B. Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat 22

C. Bentuk-bentuk Program Belajar PLS 25

D. Pola Umum Penyusunan Program PLS 29

BAB III : PELAKSANAAN TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Pengorganisasian Pelaksanaan Program PLS 38

B. Pengelolaan Tempat Belajar PLS 44

C. Pengelolaan Kegiatan Belajar PLS 48

BAB IV : PENGAWASAN PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Pengertian Pengawasan 56

B. Tujuan Pengawasan 58

C. Proses Pengawasan 60

D. Aspek-aspek yang Diawasi Dalam Pengelolaan PLS 65

Daftar pustaka 69

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

BAB I

KONSEP DASAR PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Kedudukan PLS dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan, bahwa sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikn yang berkaitan satu dengan lainnya, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebngsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka penyelenggaraan pendidikan itu dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan persekolahan dan jalur pendidikan luar sekolah.

Jalur pendidikan persekolahan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan serta sarana yang melembaga, mulai dari pendidikan taman kanak-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

kanak (TK) sampai ke pergutuan tinggi (PT). Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikn yang di selenggarakan di luar sistem persekolahan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang, berkesinambungan dan sarana yang melembaga, adapun yang termasuk pendidikan luar sekolah ini antara lain, pendidikan dalam keluarga, kelompok belajar, penyuluhan-penyuluhan,kursus-kursus dan sejenisnya. Uraian-uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Sistem Pendidikan Nasional

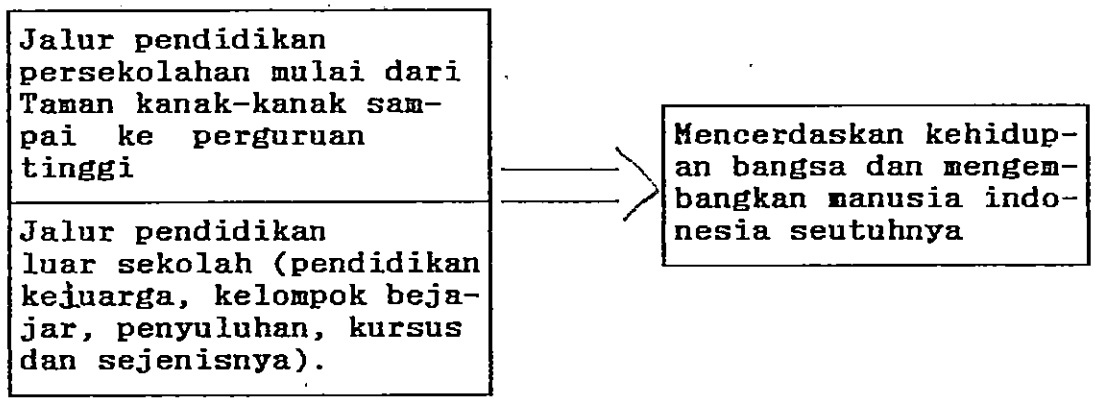

B. <u>Fungsi PLS dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional</u>

Sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, pendidikan luar sekolah mempunyai beberapa fungsi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu :

1. Komplemen pendidikan persekolahan

Yang dimaksud dengan komplemen pendidikan persekolahan yaitu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai pelengkap/menyempurnakan pendidikan yang telah diberikan di sekolah. Sasaran atau objek didik dalam hal ini adalah orang-orang atau siswa-siswa yang sedang terdaftar dalam sistem persekolahan baik di sekolah dasar, sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Komplemen pendidikan persekolahan ini diperlukan karena apa yang diberikan di sekolah belum lagi memadai sebagaimana yang diharapkan. Aktifitas-aktifitas yang termasuk ke dalam komplemen pendidikan ini antara lain, kegiatan-kegiatan olah raga, kesenian, kepanduan, kursus-kursus bidang studi yang dilaksanakan sehubungan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah dan sejenisnya.

2. Suplemen pendidikan persekolahan

Yang dimaksud dengan suplemen pendidikan persekolahan yaitu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai penambah pendidikan yang telah diberikan di sekolah. Sasaran atau objek didik dalam hal ini adalah orang-orang yang drop out dari sistem pendidikan persekolahan, dan yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan persekolahan terten-

tu. Aktifitas-aktifitas yang termasuk ke dalam suplemen pendidikan ini antara lain, program magang, penyuluhan-penyuluhan, latihan-latihan dan kursus-kursus keterampilan yang secara fungsional berguna bagi hidup dan kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya.

3. Replecemen pendidikan persekolahan

Yang dimaksud dengan replecemen pendidikan persekolahan yaitu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan yang diberikan dalam sistem persekolahan. Sasaran atau objek didik dalam hal ini adalah orang-orang yang karena berbagai keterbatasan tidak sempat mengenyam pendidikan dalam sistem persekolahan. Aktifitas-aktifitas dalam replecement pendidikan ini biasanya berbentuk program belajar paket A, dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman tiga buta yaitu, buta aksara & angka, buta bahasa indonesia dan buta pengetahuan dasar.

C. Asas dan Karakteristik PLS

Walaupun pendidikan luar sekolah dan pendidikan persekolahan sama-sama sub sistem dari pendidikan nasional, namun asas penyelenggaraannya tetap berbeda satu dengan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

lainnya. Adapun asas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah menurut Syafruddin (1983) adalah, (1) dari masyarakat, (2) oleh masyarakat, (3) untuk masyarakat dan, (4) dalam masyarakat. Uraian ringkas tentang hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Asas dari masyarakat, asas ini terlihat dalam perencanaan program PLS yang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, sumber belajar dan bahan belajarnya diambil dari masyarakat. Perencanaan program tersebut dilakukan dari bawah ke atas (dari masyarakat/LKMD diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk memperoleh bantuan pembiayaan, jika tidak diperoleh maka biaya penyelenggaraannya dikumpulkan dari masyarakat.

2. Asas oleh masyarakat, asas ini terlihat dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari dana dan penyusunan rencana program serta penilaian program yang dilakukan oleh masyarakat melalui tutor, monitor dan pamong belajar yang telah ditunjuk.

3. Asas untuk masyarakat, asas ini terlihat dari tujuan penyeleng-garaan program PLS yaitu, untuk kepentingan warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam upaya memperbaiki taraf hidup dan kehidupannya.

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

4. Asas dalam masyarakat, asas ini terlihat dari fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan program PLS yang telah disusun, seperti tempat belajarnya alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar, tutot, monitor hampir semuanya berada dalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi karakteristik penyelenggaraan pendidikan luar sekolah menurut Syafruddin (1983) adalah, (1) non formal, (2) fleksibel, (3) fungsional dan, (4) dinamis. Uraian ringkas tentang hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Karakteristik non fungsional, karakteristik ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain, dari persyaratan warga belajar yang diterima, interaksi belajar mengajar antara tutor dengan warga belajar, antara warga belajar dengan warga belajar, penjenjangan dan sebagainya.

2. Karakteristik fleksibelitas dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari penyusunan programnya dan penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat, kondisi serta stuasi belajar setempat.

3. Karakteristik fungsional, karakteristik ini dapat di-

lihat dari beberapa aspek antara lain, dari isi programnya yang diarahkan kepada masalah-masalah praktis yang terjadi di masyarakat, dalam upaya memperbaiki teraf kehidupannya.

4. Karakteristik dinamis dapat dilihat dari waktu penyelenggaraan programnya yang pendek serta tempat penyelenggaraannya yang tidak menetap.

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Diagnosis Kebutuhan Belajar (DKB)

1. Pengertian Diagnosis Kebutuhan Belajar

Dewasa ini sering kita dengar keluhan-keluhan dari pihak penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah, antara lain tentang jumlah warga belajar yang berkurang secara drastis, dan kurang tertarik/kurang antusiasnya warga belajar dalam mengikuti program, kelesuan dalam kegiatan belajar mengajar, semua itu akan mengganggu atau menghalangi kelancaran penyelenggaraan program. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah terutama sekali dalam penyusnan programnya harus memperhatikan tingkat relevansinya dengan kebutuhan belajar masyarakat.

Kebutuhan belajar merupakan keinginan (hasrat) untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap tertentu dalam upaya menjembatani antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan (Mulyadi : 1983). Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk menetapkan jenis-jenis pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan masyarakat dalam rangka menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan yang di-

inginkan itu dinamakan dengan Diagnosis Kebutuhan Belajar (DKB). Berdasarkan hasil dari diagnosis kebutuhan belajar ini barulah disusun/dirumuskan program Pendidikan Luar Sekolah, apabila program yang disusun itu benar-benar telah dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, , maka keluhan-keluhan dari pihak penyelenggara proram PLS sebagaimana yang dikemukakan di atas akan dapat dihindari.

Menyadari akan pentingnya peranan DKB dalam penyusunan program Pendidkan Luar Sekolah, Mulyadi (1983 : 7) mengemukakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan DKB yaitu :

a. Pergunakanlah orang ahli atau mintalah pendapat mereka sebelum melakukan diagnosis terhadap kebutuhan belajar masyarakat.
b. Tentukan atau pastikanlah kebutuhan kebutuhan-kebutuhan belajar masyarakat yang telah ada.
c. Atas dasar kebutuhan belajar yang telah ada usahakanlah untuk menemukan kebutuhan belajar lainnya yang dirasakan oleh masyarakat.
d. Gunakanlah teknik yang tepat dalam melakukan diagnosis kebutuhan belajar masyarakat, akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya).
e. Gunakanlah pendekatan yang tepat dalam melakukan diagnosis kebutuhan belajar masyarakat (pendekatan individual atau kelompok).

f. Latihlah para petugas secara baik sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan (seandainya menggunakan orang lain dalam melakukan diagnosis kebutuhan belajar masyarakat).
g. Tabulasikanlah hasil yang diperoleh dari diagnosis kebutuhan belajar masyarakat tersebut dengan baik.
h. Interpretasikanlah kebutuhan belajar masyarakat yang diperoleh itu dengan teliti, cermat dan tepat.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang dikemukakan di atas, diharapkan pelaksanaan diagnosis kebutuhan belajar masyarakat akan dapat berjalan dengan baik, serta memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Tujuan Diagnosis Kebutuhan Belajar Masyarakat

Secara umum diagnosis kebutuhan belajar masyarakat bertujuan untuk menentukan atau menetapkan jenis-jenis kebutuhan belajar masyarakat, yang akan dipenuhi dengan penyusunan program Pendidikan Luar Sekolah. Tujuan umum ini dapat dirinci menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik (khusus) yaitu untuk :

a. Mingidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan belajar masyarakat.
b. Mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan belajar masyarakat.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

c. Mendapatkan/memperoleh data yang konkrit tentang kebutuhan belajar masyarakat yang akan digunakan dalam penyusunan program Pendidikan Luar Sekolah.

3. Teknik-teknik Diagnosis Kebutuhan Belajar Masyarakat

Sejalan dengan pengertian dan tujuan diagnosis kebutuhan belajar yang dikemukakan di atas, maka teknik-teknik yang dapat digunakan dalam melakukan diagnosis kebutuhan belajar masyarakat antara lain yaitu :

a. Kartu Sistem Kegiatan Belajar Masyarakat (KSKBM)

Kartu sistem kegiatan belajar masyarakat adalah sejenis format atau daftar isian, yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, mengenai identitas responden, kedua mengenai pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki responden,dan ketiga, mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan oleh responden.

contoh: Format KSKBM untuk masyarakat

1).....

1). Bagian pertama

Identitas responden :	
N a m a	:.....
U m u r	:.....
Status	:.....
Pendidikan	:.....
Pekerjaan	:.....
A l a m a t	:.....
Dsb.	:.....

2). Bagian kedua

Keterampilan yang telah dimiliki :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. dst. .....

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

3). Bagian ketiga

Keterampilan yang diinginkan :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. dst.....

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kartu sistem kegiatan belajar masyarakat ini adalah :

1). KSKBM dapat diisi oleh informan sendiri, apabila informan tidak dapat membaca dan menulis maka pengisian KSKBM boleh diwakilkan kepada petugas.

2). Pengisian jenis pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dan yang ingin dimiliki oleh informan dilakukan menurut urutan periori-tas.

3). Pengisian KSKBM dapat dilakukan secara indivi-dual dan dapat pula secara berkelompok.

4). Tabulasikanlah pendapat-pendapat yang telah dikumpulkan melalui KSKBM.

5). Hitung dan rengkinglah pendapat-pendapat tersebut.

6). Tentukanlah perioritas untuk menetapkan kebutuhan belajar yang akan dipenuhi.

Contoh: Format Pentabulasian KSKBM

1). Format a (untuk pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki)

Pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki	Frekwensi yang memilih/pilihan ke.....		
	1	2	3
1. Membaca			
2. Menulis			
3. Bahasa indonesia			
4. Pengetahuan dasar			
5. Menjahit			
6. Bengkel			
7. Memangkas			
8. Elektronik			
9. Dsb.			

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

2). Format b (untuk pengetahuaan dan keterampilan yang diinginkan)

Pengetahuan dan keterampilan yang ingin dimiliki	Frekwensi yang menginginkan sebagai pilihan ke.....		
	1	2	3
1. Membaca			
2. Menulis			
3. Bahasa indonesia			
4. Pengetahuan dasar			
5. Menjahit			
6. Bengkel			
7. Memangkas			
8. Elektronik			
9. Dsb.			

b. A n g k e t

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan tentang informasi yang dibutuhkan, dan responden diminta untuk mengisinya. Angket hanya dapat diberikan kepada responden yang dapat membaca, menulis dan kalau angket disusun dengan Bahasa Indonesia, maka respondennya juga harus dapat atau me-

ngerti Bahasa Indonesia, dengan kata lain pengisian angket dalam mendiagnosis kebutuhan belajar masyarakat tidak dapat diwakilkan.

Langkah-langkah penggunaan angket sebagai teknik diagnosis kebutuhan belajar masyarakat adalah :

1). Menyusun atau menyiapkan angket yang akan digunakan dalam mendiagnosis kebutuhan belajar masyarakat.
2). Menentukan lokasi dan sasaran (tempat dan responden yang akan diberi angket).
3). Menyebarkan angket kepada responden.
4). Mengumpulkan kembali angket yang telah diisi oleh responden dan menchek kelengkapan jawabannya.
5). Mentabulasikan data yang didapatkan dengan menggunakan angket tersebut.
6). Menghitung dan merengking data yang telah dikumpulkan tersebut.
7). Menentukan perioritas, untuk menetapkan kebutuhan belajar yang akan dipenuhi.

Contoh : Format.....

810/Hd/93.
374.
Irm.
PO

Contoh : Format pentabulasian data kebutuhan belajar masyarakat yang diperoleh melalui angket.

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan	Frekwensi yang menginginkanya
1. Membaca	
2. Menulis	
3. Bahasa Indonesia	
4. Pengetahuan dasar	
5. Menjahit	
6. Bengkel	
7. Memangkas	
8. Elektronik	
9. Dsb.	

c. I n t e r v i u

Interviu yaitu mengadakan wawancara langsung dengan interviuer untuk mendapatkan informasi-inforasi yang dibutuhkan dalam mendiagnosis kebutuhan belajar masyarakat. Interviu dapat dilakukan kepada semua orang asalkan penyesuaian bahasa dapat dilakukan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan interviu adalah sebagai berikut :

1). Gunakanlah bahasa yang sesuai atau dapat dimengerti oleh interviuer.
2). Susun dan gunakanlah petunjuk interviu sesuai dengan kebutuhan.
3). Tabulasikanlah hasil atau informasi yang diperoleh melalui interviu tersebut.
4). Rengking dan tentukanlah perioritas kebutuhan belajar masyarakat yang akan dipenuhi.

Contoh : Format....

Contoh : Format pentabulasian hasil interviu

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan	Frekwensi yang membutuhkannya
1. Membaca	
2. Menulis	
3. Bahasa Indonesia	
4. Pengetahuan dasar	
5. Menjahit	
6. Bengkel	
7. Memangkas	
8. Elektronik	
9. Dsb.	

d. Observasi

observasi yaitu pengamatan langsung terhadap gejala gejala yang terjadi di dalam masyarakat, untuk memudahkan pelaksanaan observasi dalam merekam gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyararakat dapat digunakan alat bantu seperti, aneckdot record dan check list. Sedangkan langkah-langkah yang dilalui dalam penggunakan observasi sebagai teknik diagnosi kebutuhan belajar masyarakat adalah :

1). Menentukan jenis atau bentuk observasi yang akan dilakukan.

2). Menyiapkan alat bantu observasi.

3). Menentukan lokasi serta sasaran-sasaran yang akan diobservasi.

4). Melaksanakan observasi (melihat secara langsung objek yang akan diobservasi).

5). Mentabulasikan hasil observasi.

6). Menghitung dan merengking informasi atau pendapat yang diperoleh melalui observasitersebut.

7). Menentukan perioritas untuk menetapkan kebutuhan belajar masyarakat yang akan dipenuhi.

Contoh : Format pentabulasian hasil observasi

Jenis pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan	Frekwensi yang menginginkan menurut perioritas		
	1	2	3
1. Membaca			
2. Menulis			
3. Bahasa Indonesia			
4. Pengetahuan dasar			
5. Menjahit			
6. Bengkel			
7. Memangkas			
8. Elektronik			
9. Dsb.			

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

e. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok sebagai salah satu teknik diagnosis kebutuhan belajar masyarakat, dilaksanakan dengan cara tukar menukar informasi atau pendapat dalam suatu kelompok. Langkah-langkah dalam melakukan diskusi kelòm-pok adalah :

1). Mengumpulkan masyarakat pada suatu tempat atau pertemuan.
2). Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan dan tujuan diadakannya diskusi.
3). Memberikan daftar pengetahuan dan keterampilan yang dapat atau akan dilaksanakan dalam program pendidikan luar sekolah.
4). Mengadakan diskusi tentang kebutuhan belajar yang diinginkan masyarakat.
5). Menginfentarisasi pendapat-pendapat dari pengikut diskusi.
6). Mentabulasikan pendapapendapat tersebut.
7). Menghitung dan merengking pendapat-pendapat yang telah dikumpulkan tersebut.
8). Menetapkan perioritas untuk menentukan kebutuhan belajar masyarakat yang akan dipenuhi.

Contoh : Format pentabulasian hasil diskusi

Kebutuhan belajar yang diinginkan masyarakat	Frekwensi pendapat masyarakat
1. Membaca	
2. Menulis	
3. Bahas Indonesia	
4. Pengetahuan dasar	
5. Menjahit	
6. Bengkel	
7. Memangkas	
8. Elektronik	
9. Dsb.	

Untuk memperkecil dan menghindari kemungkinan kesalahan dalam menetapkan perioritas kebutuhan belajar masyarakat yang akan dipenuhi, beberapa teknik diagnosis kebutuhan belajar seperti yang dikemukakan di atas dapat digunakan sekaligus. Sehingga informasi yang dikumpulkan benar-benar lengkap, tepat dan dapat dipercaya.

B. Identivikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat

Informasi yang diperlukan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar pada suatu masyarakat, dapat diperoleh dari berbagai pihak antara lain, penja-

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

bat desa, pemuka masyarakat, kader desa, anggota masyarakat dan sebagainya. Untuk keperluan ini diperlukan instrumen-instrumen/format-format tertentu:

Contoh : Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat

Teknik yang digunakan :.....

Desa / Kelurahan :.....

K e c a m a t a n :.....

Kabupaten / Kodya :.....

Tanggal melakukan identifikasi :.....

Pelaksana : 1.....

2.....

Masalah yang dihadapi kebanyakan masyarakat dalam bidang.....	I n f o r m a n			Kesimpulan
	Pejabat desa	Pemuka masya.	Anggota Mas.dsb	
1	2	3	4	5
1. Keagamaan				
2. Kewarga negaraan				
3. Pengetahuan umum				
4. Bahasa Indonesia				
5. Pemeliharaan sumber daya alam				
6. Kependudukan				

1	2	3	4	5
7. Pemanfaatan sumber daya alam				
8. Pencegahan erosi				
9. Pengairan				
10.Pembibitan				
11.Pemupukan				
12.Pemberantasan hama				
13.Lapangan kerja				
14.Penghasilan				
15.Kebersihan				
16.Kesehatan dan olah raga				
17.Pengobatan				
18.G i z i				
19.Pemuda dan remaja				
20.Pendidikan anak				
21.Perikanan				
22.Peternakan				
23.Perdagangan				
24.Pertukangan				
25.J a s a				
26.Gontongroyong				
27.Perbengkelan				
28.K o p e r a s i				

1	2	3	4	5
29.Sarana perhubungan raga				
30.Sarana komunikasi				
31.Kesenian/budaya				
32.Keamanan dan ketertiban				
33.Penggunaan waktu senggang				
34.Buta aksara				
35.Sarana pos				
36.Pertukangan				
37.Industri kecil				
38.Organisasi sosial				
39.Dan sebagainya				

Hasil dari identifikasi kebutuhan belajar masyarakat ini, ditabulasikan, direngking, kemudian ditetepkan perioritas permasalahan dan kebutuhan belajar yang perlu ditangani/dipenuhi dengan segera.

C. Bentuk-bentuk Program PLS

Bentuk-bentuk program Pendidikan Luar Sekolah pada dasarnya tergantung kepada kebutuhan belajar masyarakat (warga belajar), hal tersebut dapat dimaklumi karena

kehadiran program PLS berdasarkan dan ditujukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (warga belajar). Berdasarkan itu maka pembagian atau pengelompokan program PLS menjadi bentuk-bentuk tertentu tergantung kepada aspek-aspek yang dijadikan dasar da-lam pengelompokkan tersebut. Sanapiah Faisal (1981: 92) mengelompokkan bentuk-bentuk program PLS berdasarkan fungsi dari Pendidikan Luar Sekolah itu sendiri, yaitu program keaksaraan, program vokasional, program kederisasi, program umum dan penyuluhan, program jiwa dan raga.

1. Program keaksaraan

Bentuk program keaksaraan ini berhubunan dengan masyarakat atau warga belajar yang buta huruf, angka, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum. Target yang akan dicapai dari program keaksaraan ini adalah terbebasnya masyarakat (warga belajar) dari cengkraman kebutaan sebagaimana yang disebutkan di atas, yang jumlahnya pada awal Repelita IV diperkirakan sebanyak 12.315.600 orang yang mereka ini masih berusia antara 7 sampai 44 tahun, (Depdikbud 1987:1).

2. Program vokasional

Bentuk program vokasional ini, berhubungan dengan masyarakat (warga belajar) yang mempunyai hambatan dalam pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari. Target yang akan dicapai dari program vokasional ini adalah, terbebasnya warga masyarakat (warga belajar) dari ketidak atau kekurang mampuannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis yang sedang atau yang akan dimasukinya, sedangkan wujud nyata dari program ini dapat berbentuk kursus-kursus seperti, kursus pertukangan, montir, mengetik, elektronik, jahit menjahit dan sebagainya.

3. Program kaderisasi

Bentuk program ini berhubungan dengan masyarakat (warga belajar) yang sedang atau bakal menjadi pemimpin atau pengelola suatu bidang/kelompok dalam masyarakat seperti, pada badan-badan atau lembaga-lembaga kemasya-rakatan, dengan adanya program kaderisasi ini diharapkan akan lahir para pemimpin atau pengelola yang dapat memenuhi kehendak dari badan-badan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dipimpinnya.

4. Program utama dan penyuluhan

Bentuk program ini berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat seperti, soal-soal keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, gizi, kewarganegaraan, hukum, adat istiadaat, rumah tangga dan sebagainya. Target yang akan dicapai dari program ini adalah supaya masyarakat (warga belajar) mengerti, menyadari dan termotivasi terhadap aspek-aspek yang

dikemukakan di atas. Sedangkan wujud nyata dari program ini dapat berbentuk ceramah, diskusi, penyuluhan-penyulugan dan sebagainya.

5. Program penyegaran jiwa raga

Bentuk program ini, erat kaitannya dengan pengisian waktu senggang, dan pengembangan minat dan bakat yang dimiliki seseorang, baik dalam olah raga, seni maupun di luar kegiatan ini seperti, berkemah, rekreasi, mendaki gunung dan sebagainya.

Di samping pengelompokkan bentuk-bentuk program Pendidikan Luar Sekolah yang dikemukakan di atas, Depdikbud (1987 : 4) mengelompokkan bentuk-bentuk program PLS ini atas dasar prakteknya di lapangan yaitu :

1. Program utama yang meliputi,
   a. Program kejar paket A atau program kejar pendidikan dasar,program ini dimaksudkan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman tiga buta yaitu, buta aksara, buta angka, dan buta Bahasa Indonesia. Sedangkan pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu (bersamaan) dengan pendidikan mata pencaharian.
   b. Program kejar usaha, program ini dimaksudkan untuk membelajarkan masyarakat dalam rangka mengejar ketinggalan-ketinggalannya dalam bidang usa-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

ha dengan cara belajar, bekerja dan berusaha guna untuk memperoleh suatu mata pencaharian dalam upaya penambahan penghasilnya.

2. Program pendukung, terdiri dari:
   a. Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
   b. Program Kejar Kejuruan Masyarakat
   c. Kursus-kursus Pendidikan Luar Sekolahn Masyarakat

Program pendukung ini pada hakekatrnya berfungsi sebagai wahana/wadah untuk melestarikan dan melaksanakan program kejar paket A, dan salah satu usaha untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan dalam kelompok belajar usaha.

D. Pola Umum Penyusunan Program Pendidikan Luar Sekolah

Dalam pola umum ini akan dikemukakan unsur-unsur yang essensial dari suatu program Pendidikan Luar Sekolah dan selanjutnya dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta program sebagai anggota dari masyarakat. Pola umum tersebut menurut Aliasar (1988:5-20) berisikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tujuan program

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa program pendidikan luar sekolah merupakan program peningkatan sumber daya manusia,

yang disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan individu, masyarakat, organisasi/lembaga dan kebutuhan nasional. Program yang disusun itu akan lebih bermanfaat apabila pada program tersebut terjalin secara harmonis ketiga macam kebutuhan di atas. Sering ditemui perbedaan pendapat dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan individu, masyarakat ataupun negara, hal ini disebabkan karena belum semua perencana program pendidikan luar sekolah memahami konsep tentang kebutuhan, dan sering kali mereka menyamakannya dengan keinginan, walaupun kadang-kadang ada di antara kebutuhan yang merupakan keinginan.

Kebutuhan individu, masyarakat dan lembaga/organisasi dapat diidentifikasikan melalui problematik-problematik yang ditemui individu atau masyarakat melalui prosedur-prosedur pengidentifikasian kebutuhan (sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya). Dengan berorientasikan kepada ketiga jenis kebutuhan tersebut, disusunlah tujuan-tujuan khusus dari program pendidikan luar sekolah yang akan dilaksanakan. Di samping itu perumusan tujuan ini harus pula disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta atau pengikut program.

2. Identifikasi sumber-sumber

Peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan luar sekolah tidak terlepas dari pendayagu-

pendidikan luar sekolah tidak terlepas dari pendayagunaan atau pemanfaatan sumber-sumber yang dijumpai dalam masyarakat. Sumber-sumber tersebut dapat diklasifikasikan kepada :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dijumpai dalam masyarakat dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, diklasifikasikan kepada tiga golongan.Pertama adalah orang-orang yang ditingkatkan sumber dayanya sesuai dengan tujuan program pendidikan luar sekolah yang telah dirumuskan seperti, kelompok tani, kelompok pemuda putus sekolah, kelompok pengerajin dan sebagainya.Kedua orang-orang yang dapat diharapkan untuk mengorganisir penyelenggaraan program pendidian luar sekolah seperti, steering committe, organizing committe dan sebagainya, baik yang berasal dari instansi-instansi peemerintah, tanaga sukarela maupun dari pemuka-pemuka masyarakat. Ketiga orang-orang yang dapat diharapkan untuk menjadi tutor atau instrutur dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, mereka ini dapat berasal dari instansi pemerintah, tenaga sukarela, pemuka masyarakat, mahasiswa dan sebagainya.

b. Sumber material

Sumber kekayaan alam yang terdapat di darat di laut yang harus diorganisir untuk meningkatkan sum-

berdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Sumber material ini dapat diklasifikasikan kepada, pertama sumber material yang dapat diolah seperti bidang pertanian,bidang perikanan, peternakan dan sebagainya. kedua adalah sumber material yang termasuk kepada sarana dan parasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah seperti, gedung-gedung, lapangan olah raga, kolam dan sebagainya. Ketiga sumber material yang berupa buku, majalah, jurnal, laporan penelitian, slide, flem dan sebagainya yang banyak terdapat di perpustakaan.

c. Sumber dana

Untuk kelancaran penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dana merupakan faktor yang sangat menentukan sekali. Dana yang diperlukan itu dapat berasal dari pemerintah baik daerah maupun pusat, masyarakat, individu-individu yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan program, dan dari sumbangan-sumbangan donatur-donatur lainnya.

d. Sumber informasi

Dalam penyusunan perencanaan program pendidikan luar sekolah sangat diperlukan sekali adanya informasi-informasi yang tepat. Informasi itu dapat diperoleh melalui hasil-hasil laporan, penelitian, seminar, sensus maupun pendapat yang dihimpun dari warga masyarakat lainnya.

warga masyarakat lainnya.

Apabila sumber-sumber daya manusia, sumber material, sumber dana dan sumber informasi telah diidentifikasikan, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengorganisir dan menata sumber-sumber tersebut untuk dapat dimanfaatkan sebagai penggerak proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan luar sekolah.

3. Pengorganisasian dan penataan

Sebagaimana yang telah ditregaskan dalam GBHN (1988:47) bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Khususnya untuk pendidikan orang dewasa bukan saja menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab setiap individu untuk membelajarkan dirinya masing-masing, serta memberikan pelajaran kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka masing-masing. Sedangkan dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di Indonesia biasanya dipelopori oleh pemerintah yang idenya bersumber dari perorangan atau masyarakat.

4. Metode pencapaian tujuan

Untuk mencapai tujuan program yang telah disusun dalam penyelenggaraan program pendidikan luar se-

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

kolah dapat digunakan bermacam-macam metode. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung kepada tutor atau instruktur, warga belajar, tujuan yang akan dicapai, waktu yang tersedia, serta peralatan yang ada. Di antara metode-metode itu adalah, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, seminar, latihan, penemuan, worskhop, karyawisata dan sebagainya.

5. Alokasi waktu

Cukup banyak yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan program. Hal-hal yang perlu diingat dalam menentukan alokasi waktu tersebut adalah keadan sosial budaya serta iklim pada suatu daerah, karena ini sangat mempengaruhi dan menentukan sekali terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.

6. Alokasi biaya

Pembiayaan diperhitungkan dalam bentuk jumlah uang yang diperlukan dalam penyelenggaraan program. Sedangkan sumber-sumber dana yang diperlukan dalam hal ini telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Penggunaan uang (pembiayaan) dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dapat dianalogikan dengan pemakaian waktu. Dalam penetapan biaya perlu diperhitungkan kemungkinan adanya inflasi dan devaluasi, sebab apabila ini terjadi akan mempengaruhi jalannya pe-

nyelenggaraan program. Setiap unit program perlu menyusun rencana anggaran biaya/alokasi biaya masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai dari unitnya masing-masing.

7. Monitoring dan kontrol

Tujuan utama dari monitoring adalah untuk merekam semua peristiwa (event) yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,sedangkan kontrol bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program, karena adakalanya kenyataan (pelaksanaan) kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, faktor-faktor yang dahulu tidak diperhitungkan atau diabaikan mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak mustahil akan dapat menghambat/mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan untuk menghindari atau mengatasi hal tersebut kontrol sangat memegang peranan penting.

8. Evaluasi program

Evaluasi merupakan alat untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan suatu program. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam pengeloaan program pendidikan luar sekolah adalah, input program, proses pelaksanaan program, pencapaian tujuan program, metodologi, dampak dan evaluasi terhadap penggunaan biaya dalam penyelenggaraan program.

Sejalan dengan pola umum di atas Depdikbud (1987:14) mengemukakan beberapa faktor yang harus ada dalam program pendidikan luar sekolah yang telah dirumuskan yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai, tujuan ini hendaknya dirumuskan dengan jelas dan terinci, karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung kepada tujuan yang dirumuskan ini.
2. Peserta belajar (warga belajar) hendaklah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dirumuskan dalam program belajar yang akan dilaksanakan.
3. Penyelenggara atau pelaksana program harus dikemukakan secara jelas.
4. Kualifikasi tutor atau instruktur dan sumber belajar yang diperlukan dalam pelaksanaan program harus dijelaskan secara rinci.
5. Tempat atau lokasi pelaksanaan program hendaklah dinyatakan.
6. Jadwal kegiatan pelaksanaan program hendaklah disusun sedemikian rupa.
7. Hasil belajar yang diharapkan hendaklah dikemukakan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam program.
8. Dana belajar yang diperlukan hendaklah dijelaskan baik sumber maupun penggunaannya.

9. Mata pencarian yang sedang dan akan diusahakan oleh warga belajar setelah mengikuti program.

Khusus untuk program kejar usaha di samping aspek-aspek tersebut di atas, dilengkapi dengan rencana pemasaran hasil usaha, dan rencana penggunaan dana belajar.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Pengorganisasian Pelaksanaan Program PLS

Pengorganisasian pelaksanaan program PLS merupakan pengelompokkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan program PLS itu sendiri, yang terdiri dari :

1. Pembina program PLS, yaitu orang/penjabat yang karena tugas atau jabatannya berwenang dan bertanggung jawab serta turut menentukan kelancaran pelaksanaan program PLS itu sendiri, mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa atau Kelurahan.

   a. Pembina di tingkat provinsi, yaitu Kakanwil dan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Kanwil Depdikbud, sebagai pembina teknis dan administratif, sedangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai pembina yang mengorganisasikan penyelenggaraan program PLS. Tugas pembina di tingkat provinsi ini adalah :

      1). Menginformasikan kepada Kasi Dikmas Kakandepdikbud kabupaten/kodya tentang tersedianya dana penyelenggaraan program luar sekolah.

      2). Menetapkan wilayah Kabupaten/Kodya yang memperoleh jatah dana penyelenggaraan pendidikan

luar sekolah.

3). Mengalokasikan dana untuk tiap-tiap kabupaten/ Kodya yang memperoleh jatah.

4). Menyusun petunjuk pelaksanaan pendidikan luar sekolah yang dipedomani oleh Kasi/penilik dikmas dalam menjalankan program PLS.

5) Menetapkan pembentukan kelompok belajar PLS yang diusulkan oleh pembina ditingkat Kabupaten

6). Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembina di tingkat Kabupaten/Kodya dalam melaksaanakaan tugasnya.

7). Kasi Dikmas Kanwil Deepdikbud menerima laporan pelaksanaan program dari Kasi Dikmas Kandepdikbud Kabupaten/Kodya, mengolah laporan tersebut, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Kakanwil Depdikbud (tembusannya kepada Gubernur dan Direktur Dikmas).

b. Pembina di tingkat Kabupaten/Kodya, yaitu Kakandepdikbud Kabupaten/Kodya, Kasi Dikmas Kakandepdikbud Kabupaten/Kodya sebagai pembina teknis dan administratif, Bupati/Wali Kota Kepala Daerah tingkat II sebagai pembina yang mengorganisasikan penyelenggaraan program PLS didaerahnya. Tugas dari pembina di tingkat Kabupaten/Kodya adalah :

1). Menampung usulan program PLS dari Penilik Dikmas, kemudian menilai kelayakannya,dan menetapkan usulan yang diterima menurut skala perioritas.

2). Mengusulkan Program penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di wilayahnya, kepada bidang Dik - mas (setelah dikonsultasikan dengan Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya).

3). Menerima dana belajar pendidikan luar sekolah dari Bidang Dikmas, dan meneruskannya kepada Penilik Dikmas yang programnya telah disetujui.

4). Membuat petunjuk pelaksanaan di lapangan (juklak) jika diperlukan, untuk dipergunakan oleh para penilik dalam penyelenggaraan program di lapangan.

5). Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penilik Dikmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

6). Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan dari Penilik Dikmas yan selanjutnya dilaporkan kepada pembina tingkat provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II.

c. Pembina di tingkat Kecamatan, yaitu Kakandepdikbud Kecamatan dan Penilik Dikmas sebagai pembina teknis dan educatif serta pembina administratif, sedangkan

camat sebagai pembina yang mengorganisasikan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah di darah atau wilayah kerjanya. Tugas dari pembina tingkat Kecamatan ini adalah :

1). Merencanakan program pendidikan luar sekolah secara bertahap dan bergilir di daerahnya.
2). Menerima dan mengesahkan program penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, dan akad kerjasama dari penyelenggara.
3). Mengirim usulan program dan akad kerjasama yang telah disahkan kepada Kakandepdikbud Kabupaten/ Kodya (tembusan kepadaa Kasi Dikmas).
4). Menerima dana belajar dari proyek, melalui pembina tingkat Kabupaten/Kodya, dan menyerahkan dana tersebut kepada kelompok belajar.
5). Mengadakan akad kerjasama dengan pihak penyelenggara pendidikan luar sekolah.
6). Membina dengan cara memberikan bimbingan dan pengawasan kepada penyelenggara dan pelaksana program di lapangan.
7). Melaporkan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah kepada Kakandepdikbud Kecamatan (tembusan kepada Kasi Dikmas Kandepdikbud Kabupaten/Kodya).

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

d. Pembina di tingkat Desa/Kelurahan, yaitu Lurah/Kepala Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), tugas dari pembina di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

1). Memberikan informasi kepada masyarakat tentang akan adanya kegiatan/penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di Desanya.

2). Menampung usulan-usulan dari pihak pelaksana kegiatan di desa dan meneruskannya kepada Penilik Dikmas.

3). Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah di desanya.

4). Menerima laporan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dari penyelenggara, setelah diolah diterskan kepada Penilik Dikmas (tembusan kepada Kepala Desa/Lurah).

5). Menyusu program penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang tersedia.

2. Penyelenggara Program PLS, yaitu oran atau lembaga kemasyarakatan seperti, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), lembaga pendidikan, lembaga keamanan, satuan tugas PLS, PKK dan sebagainya. Tugas dari penyelenggara ini adalah :

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

a. Menyusun program penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di desa/kelurahannya.

b. Mengadakan atau membuat akad kerjasama dengan Penilik Dikmas.

c. Membina dan memberikan bimbingan serta pengawasan kepada para pelaksana di lapangan.

d. Menyusun administrasi penyelenggraan kegiatan di lapangan.

e. Melaporkan perkembangan kegiatan kelompok belajar kepada pembina di tingkat desa/kelurahan.

3. Pelaksana Program PLS, yaitu organisasi-organisasi seperti, PKK, dharmawanita, Organisasi kemanan, KNPI, koperasi dan sebagaainya. Lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, mesjid, pondok pasentren, gereja, rukun warga (RW), rukun keluarga (RK), kursus-kursus dan sebagainya. Pagayuban seperti, arisan, kontak tani,kelompencapir, pagayuban aksara dan sebagainya. Sedangkan tugas dari pelaksana program pendidikan luar sekolah ini adalah :

a. Menyusun program pelaksanaan kelompok belajar pendidikan luar sekolah.

b. Mengusulkan program tersebut kepada pihak penyelenggara.

c. Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan kepada pihak penyelenggara program.

d. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan kelompok belajar.

e. Membina dan memotivasi kelompok belajar pendidikan luar sekolah.

f. Menyusun, melaporkan pelaksanaan kegiatan kelompok belajar kepada penyelenggara.

B. Pengelolaan Tempat Belajar PLS.

Yang dimaksud dengan tempat belajar pendidikan luar sekolah adalah suatu tempat (lokasi) yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan belajar dari warga belajar (peserta program pendidikan luar sekolah) baik di bawah bimbingan tutor maupun yang berlangsung sesama mereka.Supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik maka tempat belajar dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar perlu dirancang, ditata diatur dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi yang menunjang untuk tercapainya tujuan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan tempat belajar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dinamakan dengan pengelolaan tempat belajar pendidikan luar sekolah. Dalam

pengelolaan tempat belajar PLS ada beberapa Faktor yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Identifikasi kegiatan belajar PLS

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan semaksimala mungkin potensi-potensi yang tersedia untuk digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapakan. Aspek-aspek yang perlu diidentifikasikan adalah ;

a. Lokasi yang dapat dijadikan pelaksanaan kegiatan belajar.
b. Jumlah penduduk yang berusian antara 12 - 45 tahun (yang masih tuna akasara).
c. Kegiatan-kegiatan dari berbagai instansi pamerintah yang beroperasi sampai ke desa-desa.
d. Sumber daya alam yang secara potensial dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan penghasilan masyarakat.
e. Sumber daya masyarakat seperti, adat istiadar, norma norma, kepercayaan dan sebagainya yang secara potensial dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar masyarakat.
f. Sumber-sumber sosial seperti, organisasi sosial,dan kelompok sosial yang ada di desa serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar masyarakat.

g. Sumber-sumber keuangan baik yang berbentuk uang maupun yang berbentuk fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar.

h. Sumber belajar perorangan seperti, alim ulama, tokoh tokoh masyarakat, tukang, pedagang, montir dan sebagainya, yang dapat dijadikan sebagai orang sumber dalam kegiatan belajar mengajar.

i. Berbagai bahan, media, dan sumber-sumber lainnya seperti, buku, majalah, koran, jurnal dll, yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.

Bahan, media, dan sumber belajar tersebut di atas merupakan kekayaan dan potensi pedesaan yang sering tidak atau belum dimanfaatkan sebagaimanaa mestinya, oleh karena itu salah satu tugas pengelolaan program adalah mengidentifikasikan sumber-sumber itu, kemudian memperkenalkannya kepada warga belajar atau masyarakat agar mereka mengetahui akan adanya sumber-sumber tersebut, dan yang penting adalah agar mereka dapat menimbulkan minat dan motivasi mereka untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan belajarnya.

2. Kriteria penentuan tempat belajar PLS

Tempat belejar yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, ditetapkan berdasarkan keinginan warga belajar, dan tempat belajar

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

tersebut hendaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Letaknya strategis dan mudah dikunjungi oleh semua warga belajar.
b. Ruangan belajar dapat menampung antara 5 sampai 10 orang warga belajar.
c. Peralatan ruangan tidak parmanen, sehingga mudah diobah-obah sesuai dengan kebutuhan.
d. Pintu, jendela dan ventilasi ruangan hendaknya memudahkan terjadinya pertukaran udara dalam ruangan.
e. Alat penerangan cukup memadai.
f. Tempat belajar hendaknya aman dari gangguan lingkungaan.
g. Kalau tempat belajar menggunakan rumah penduduk di samping kriteria-kriteria di atas, juga harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pemilik rumah, seperti, pemilik rumah benar-benar ikhlas rumahnya digunakan untuk kegiatan belajar, tidak pemarah, darmawan dan sebagainya (Latif Ismail : 1983).

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

C. Pengelolaan Kegiatan Belajar PLS

Kegiatan belajar pendidikan luar sekolah adalah interaksi yang terjadi baik antara warga belajar dengan warga belajar maupun antara warga belajar dengan tutot. Stuasi dan iklim belajar dalam kegiatan belajar pendidikan luar sekolah terjadi secara kolegial, adanya saling tukar menukar informasi baik sesama warga belajar maupun antara warga belajar dengan tutor, sehingga terjadilah kegiatan saling belajar dan membelajarkan. Apabila ditemui permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar ataupun yang menyangkut kehidupan nyata warga belajar didiskusikan secara bersama dalam hal ini tutor hanya mengawasi jalannya kegiatan dan memberikan bimbingan-bimbingan ataupun pengarahan-pengarahan bila diperlukan.

Dalam pengelolaan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain :

1. Bentuk kegiatan belajar PLS

   Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, maka kegiatan belajar PLS yang dilaksanakan dapat berbentuk :

   a. Kegiatan belajar untuk membebaskan masyarakat dari tuna aksara agar mereka dapat membaca, menulis, mengenal angka dan bahasa indonesia.

b. Kegiatan belajar (lanjutan) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada aksarawan agar memperoleh pengetahuan yang setaraf dengan pendidikan dasar.

c. Kegiatan belajar keterampilan seperti, jahit-menjahit,tukang kayu, memangkas rambut, montir dan sebagainya dengan tujuaan agar merekaa dapat mempergunakan keterampilan yang diperolehnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau pekerjaan sampingan sebagai penambah penghasilan keluarga.

d. Kegiatan belajar pengisi waktu senggang seperti,kelompok diskusi, smulasi P4, kelompencapir, latihan kepemimpinan dan sebagainya.

e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan PLS yang akan dicapai.

Di samping itu pelaaksanaan kegiatan belajar dalam pendidikan luar sekolah, dapat dilakukan secara perorangan, dengan kata lain warga belajar, belajar sendiri melalui sumber-sumber belajar yang tersedia tanpa dibantu oleh tutor atau orang lain, dan dapat pula dilakukan secara berkelompok baik dibantu maupun tidak dibantu oleh tutor.

Agar kegiatan belajar secara berkelompok dapat berjalan dengan baik maka pembentukan kelompok harus didasarkan kepada :

a. Adanya kebutuhan yang sama dari warga belajar.
b. Adanya kesamaan minat, bakat dan hasrat untuk belajar secara bersama.
c. Adanya kesesuaian di antara anggota kelompok.
d. Dalam pembentukan kelompok sebaiknya juga mempertimbangkan tempat tinggal dari warga belajar, (Depdikbud 1987 : 44).

2. Karakhteristik kegiatan belajar PLS

Secara umum antara kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, dengan kegiatan belajar dalam sistem peraekolahan (formal) terdapat kesamaan-kesamaan, namun kedua kegiatan belajar itu juga mempunyai karakhteristik-karakhteristik tersendiri.

Adapun yang menjadi karakhteristik dari kegiatan belajar pendidikan luar sekolah antara lain :

a. Kegiatan belajar berpusat kepada warga belajar, maka dari itu kegiatan belajar lebih ditekankan pada cara belajar warga belajar aktif (CBWBA).
b. Materi belajarnya berorientasi kepada kebutuhan warga belajar, baik kebutuhan saat sekarang maupun kebutuhan pada masa yang akan datang.
c. Metoda belajarnya diutamakan yang mempunyai kadar cara belajar warga belajar aktif (CBWBA) yang ting-

gi seperti, metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan simulasi.

d. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara warga belajar dengan tutor.

e. Pelaksanaan kegiatan belajar diharapkan dapat menampung keinginan, aspirasi dan harapan dari warga belajar.

f. Kegiatan belajar merupakan wadah untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia seperti, sumber belajar yang bersifat alami, sumber sosial dan sumber-sumber lainnya.

Karakhteristik-karakhteristik diatas perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, sebab apabila ini diabaikan akan menimbulkan efek-efek negatif yang akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah itu sendiri.

3. Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan belajar PLS

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan belajar PLS dapat dikelompokkan kepada tiga kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, hanya saja pada pembahasan ini kegiatan pengawasan di-

rinci lagi menjadi kegiatan monitoring, evaluasi dan kegiatan supervisi in dimaksidkan untuk memperlihatkan luasnya ruang lingkup dari pengawasan, di samping itu juga untuk menghindari anggapan-angapan yang negatif tentang pengawasan itu sendiri.

a. Perencanaan kegiatan belajar PLS

Sesuai dengan betuk-bentuk kegiatan belajar pendidikan luar sekolah yang dikemukakan di atas, maka faktor-faktor pokok yang harus dirumuskan dan ditetapkan pada langkah ini antara lain :

1). Tujuan yang akan didapat dari kegiatan belajar.
2). Materi belajar yang akan diberikan untuk mencapai tujuan tersebut.
3). Metode pengajaran yang akan digunakan dalam menyajikan materi kepada warga belajar.
4). Alat/media yang akan dipakaai untuk memudahkan warga belajar dalam menguasaai materi yang disajikan.
5). Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan kegiatan belajar yang telah ditetapkan.

Semua faktor tersebut di atas, harus dirumuskan secara matang padaa langkah ini, karena faktor-faktor tersebut merupakan sentral atau dasar bagi kegiatan-kegiatan berikutnya.

b. Pelaksanaan kegiatan belajar PLS

Pelaksanaan kegiatan belajar pendidian luar sekolah yang dimaksudkan disini adalah, proses interaksi belajar mengajar yang terjadi baik antara warga belajar dengan warga belajar mapun antara warga belajar dengan tutor (sebagai realisasi dari rencana yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya).

c. Monitoring kegiatan belajar PLS

Monitoring kegiatan belajar pendidikan luar sekolah adalah usaha-usaha yang dilakuan untuk merekam segala peristiwa (event) yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan belajar berlangsung, yang meliputi monitoring terhadap :

1). Proses interaksi belajar mengajar.
2). Hubungan antara warga belajar dengan warga belajar lainnya dan hubungan antara warga belajar dengan tutor.
3). Presensi warga belajar.
4). Keterlibatan pihak penyelenggara program.
5). Cara tutor menyampaikan informasi kepada warga belajar.
6). Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kegiatan belajar lainnya.

Pada kegiatan ini sangat dituntut kejelian dan kemampuan pengelola atau monitor dalam mengikuti proses kegiatan belajar, sehingga tidak ada satupun kejadian (event) yang lolos dari rekamannya.

d. Evaluasi kegiaatan belajar PLS

Evaluasi kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, meliputi penilaian terhadap proses yang terjadi dalam kegiatan belajar, proses interaksi, dinamika belajar dan aturan-aturan yang dipergunakan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan proses belajar mengajar, bukan untuk menilai kecerdasan atau penguasaan warga belajar tentang materi yang telah disajikan.

e. Supervisi kegiatan belajar PLS

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan belajar akan diketahuilah hal-hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan atau diperbaiki pelaksanaannya dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pada masa-masa berikutnya dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Perlu diketahui antara kegiatan monitoring, evaluasi dan kegiatan supervisi sering kali dilak-

sanakan secara smultan, dan ketiga kegiatan ini dapat pula dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

BAB IV

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Pengertian Pengawasan

Pertanyaan pertama dan mendasar yang harus dijawab dalam membahas tentang pengawasan adalah kenapa pengawasan itu perlu dilaksanakan. Basori Mukti (1988) mengemukakan dua alasan pokok yang mendasari perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada suatu lembaga/ organisasi, pertama adanya perbedaan tujuan antara individu (orang yang melakasanakan kegiatan) dengan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tempat dia melaksanakan pekerjaan, untuk menjaga agar individu yang melaksanakan pekerjaan tersebut dapat bekerja ke arah pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan sekali. Kedua adanya penundaan waktu atau rentangan waktu antara saat dirumuskan atau ditetapkannya rencana dengan saat pelaksanaan dari rencana tersebut, selama penundaan/ rentangan waktu ini maka kondisi-kondisi yang tidak diinginkan akan dapat terjadi yang akhirnya akan menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk menjaga atau menghindari supaya hal-hal tersebut tidak terjadi maka

pengawasan sangat diperlukan sekali. Pada uraian di atas sebenarnya telah tergambar bahwa pengawasan pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui, menilai dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi atau lembaga agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Untuk bahan perbandingan di bawah ini dikutibkan beberapa pendapat ahli manajemen tentang pengawasan.

1. George R.Terry mengemukakan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.
2. Newman mengemukakan pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Hendry Fayol mengemukakan pengawasan merupakan pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukn, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali, (Sujamto 1983 15-16).

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN
MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

4. Sondang P.Siagian (1985 : 135) mengemukakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Sarwoto (1981 : 93) menegaskan pengawasan adalah kegiatn manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat betapa eratnya hubungan atau kaitan dari ketiga fungsi pokok pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) dalam rengka mencapai tujuan organisasi/lembaga.

B. Tujuan Pengawasan

Disadari atau tidak bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pasti di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengawasan sebagai salah satu kegiatan dalam pengelolaan, juga dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Depdikbud (1977) mengemukakan tujuan utama diadakan pengawasan adalah untuk menjaga dan mendorong agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan undang-

undang yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan. Sejalan dengan tujuan di atas, Soekarno Kartowardojo (1986 : 146) mengemukakan beberapa tujuan yang akan dicapai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi/lembaga yaitu.

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah digariskan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, dan kekurangan-kekurangan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan suatu kegiatan apakah berjalan secara efisien.
5. Untuk mencarikan jalan ke luar apabila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Dari tujuan pengawasan yang dikemukakan di atas dapat dilihat betapa pentingnya peranan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi/lembaga.Dengan adanya pengawasan maka pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga akan dapat berjalan sesuai dengan ren-

cana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi/lembaga tersebut, sebab dengan adanya pengawasan ini apabila ada hambatan-hambatan, penyimpangan-penyimpangan dan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan segera dapat diambil tindakan-tindakan yang positif, baik berupa bimbingan-bimbingan, pengarahan pengarahan maupun perbaikan-perbaikan seperlunya.

C. Proses Pengawasan

Betapapun sederhananya kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, selalu menempuh langkah-langkah (proses kerja) tertentu. Dalam kegiatan pengawasan langkah-langkah/proses kerja yang harus ditempuh menurut Manullang (1985 : 183) adalah :

1. Menetapkan alat ukur (standard)
2. Mengadakn penilaian (evaluate)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiva action)

Ketiga langkah tersebut harus ditempuh dalam melakukan setiap kegiatan pengawasan. Di samping itu Winardi (1983: 381) mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap suatu kegiatan harus melalui lngkah-langkah berikut yaitu :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (bila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan-tindakan perbaikan.

Kalau kedua pendapat tentang proses pengawaan di atas dianalisis lebih lanjut tidak ditemui perbedaan-perbedaan yang mendasar. Menurut Manullang pelaksanaan kegiatan pengwasan di mulai dengan menetapkan alat ukur, dan menurut Winardi pelaksanaan kegiatan pengawasan di mulai dengan mengadakan pengukuran terhadap hasil pekerjaan, sedangkan untuk langkah berikutnya (langkah ke dua dan ketiga) pada dasarnya mereka sependapat, sayangnya Winardi tidak mengemukakan/menjelaskan dasar yang mereka gunakan untuk mengadakan atau melakukan langkah kedua dan ketiga tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, Syahril (1987 : 20-22) menyimpulkan bahwa langkah-langkah proses kerja) yang harus dilakukan/dilalui dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu kegiatan adalah :

1. Menetapkan alat ukur

   Bila seseorang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, pertama-tama yang harus

mereka tetapkan adalah standar atau alat ukur yang akan mereka pakai dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Standar atau alat ukur ini berguna sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, standar atau alat ukur yang digunakan dalam hal ini biasanya berbentuk target atau kriteria pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Syafaruddin (1983:16-17) mengelompokkan kriteria tersebut kepada, kriteria kuantitatif seperti banyaknya unsur yang dinilai & kriteria kualitatif seperti kejelasan, sistimatika dari perumusan & pelaksanaan kegiatan serta kriteria yang berhubungan dengan standar ideal yang telah ditetapkan seperti dibidang pertanian, gizi, ekonomi dan sebagainya. Rencana kerja yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam organisasi/lembaga secara langsung dapat dijadikan sebagai standar atau kriteria untuk mengukur lancar tidaknya pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi/lembaga.

2. Mengadakan pengukuran

Setelah standar atau alat ukur yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan ditetapkan, maka langkah berikutnya yang akan dilakukan dalam proses pengwasan adalah mengadakan pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Latif Ismail (1983 : 19)

menamakan langkah ini dengan kegiatan monitoring yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk merekam seluruh peristiwa (event) yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatn di lapangan, baik berupa kemajuan maupun kemunduran dan faktor-faktor pendukung/penghambat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada langkah ini sangat dituntut kejelian dan ketelitian seorang pengawas dalam mengamati dan melihat peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3. Membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan target atau standar yang telah ditetapkan

Pada langkah pertama seseorang yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatn telah menetapkan standar atau target yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan di lapangan, sedangkan pada langkah kedua telah dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka pada langkah ketiga ini target/standar kerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pada langkah ini akan diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, biasanya langkah ini dinamakan orang dengan kegiatan penilaian yang tujuan utamanya adalah untuk melihat sampai di mana keberhasilan pelaksanaan suatu

pekerjaan.

4. Menganlisis hasil pelaksanaan pekerjaan

Dengan diketahuinya tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan,langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Seandainya pekerjaan yang dilaksanakan belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pertanyaan pokok yang harus dijawab pada langkah ini adalah apakah yang menyebabkannya demikian, atau apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sedangkan kalau pekerjaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau dengan kata lain telah mencapai hasil sebagimana yang diharapkan, maka pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah apakah faktor-faktor pendukung yang menyebabkannya sehingga dapat berjalan seperti demikian.

5. Mengadakan follow up

Setelah hasil pelaksanaan pekerjaan diketahui dan dianalisis, maka langkah berikutnya atau terakhir dalam proses pengawasan yaitu mengadakan follow up atau memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan-pengarahan dan peraikan-perbaikan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang belum berjalan sesuai dengan rencana agar dapa mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan bagi pelaksanaan pekerjaan yang telah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tetap diberikan pengarahan dan bimbingan-bimbingan agar ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Latif Ismail (1983 : 20) menamakan langkah ini dengan kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

D. Aspek-aspek yang Perlu Diawasi Dalam Pengelolaan Program PLS

Penagawasan terhadap pengelolaan program PLS dapat dibedakan berdasarkan sasaran (obyek) yang akan diawasi dalam pengelolaan program PLS itu sendiri yaitu :

1. Pengawasan terhadap komponen program

Pengawasan terhadap komponen program didasarkan kepada komponen-komponen yang membentuk sistem dari pada program itu sendiri yaitu :

a. Pengawasan terhadap masukan yang meliputi pengawasan terhadap, warga belajar, ketenagaan (tutor dan monitor, sarana dan prasarana belajar, kurikulum serta buku paket atau modul yang digunakan. Aspek-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

aspek yang diawasi dalam hal iani adalah kualitas, kelengkapan, penggunaan sarana dan prasarana, daya guna kuriku lum dan kualifilasi ketenagaan.

b. Pengawasan terhadap proses meliputi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut peranan masing-masing sub komponen dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan progr-am. Aspek-aspek yang diawasi dalam hal ini adalah kesesuaian antara peranan yang telah dilakukan (peranan aktual) dengan peranan yang diharapkan (peranan ideal) dari tiap-tiap sub komponen yaitu, warga belajar, tutor, monitor, sarana & prasarana, kurikulum dan buku buku paket.

c. Pengawasan terhadap hasil yaitu pengawasan terhadap pencapaian tujuan program, yang mencakup pengawasan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek yaitu hasil belajar mengenai pokok-pokok bahasan yang telah dipelajari, pengawasan terhadap pencapaian tujuan jangka menengah yaitu penguasaan terhadap kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki warga belajar setelah selesai mengikuti program, dan pengawasan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang yaitu manfaat yang dicapai dari pelaksanaan program terhadap perbaikan kehidupan warga belajar.

2. Pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan program

Pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan proram didasarkan kepada aspek-aspek yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan program itu sendiri yaitu :

a. Pengawasan terhadap kelembagaan yang mencakup pengawasan terhadap legitimitas penyelenggaraan program sebagai program pembanguanan LKMD. Pengawasan terhadap aspek kelembagaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka memperbaiki pengorganisasian program berdasarkan asas koordinasi, intensifikasi, sinkronisasi dan simplifikasi sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan program.
b. Pengawasan terhadap perencanaan program yang meliputi prosedur dan proses perencanaan program serta kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan.
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pembinaan yang meliputi, pengawasan terhadap teknis pelaksanaan program. Aspek-aspek yang diawasi dalam hal ini adalah kemampuan tutor/fasilitator dalam membe-

lajarkan warga belajar,mengarahkan diskusi, penggunaan, media, metoda, sarana dan prasarana serta kemampuan dalam mengarahkan agar warga belajar dapat mempraktekan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan terhadap penyelenggaraan program dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang pelaksanaan program dan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi pembinaan penyelenggaraan program berikutnya, sedangkan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan program dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan program.

d. Pengawasan terhadap efisiensi ekonomik yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan program dibanding dengan keuntungan yang diperoleh sebagai tambahan penghasilan dari warga belajar setelah mengikuti program yang disajikan.

e. Pengawasan terhadap dampak program bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, apakah pelaksanaan program berhasil menimbulkan perbaikan kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan tujuan untuk melihat apakah pelaksanaan program dapat menimbulkan kebutuhan belajar masyarakat dan sebagainya.

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

Aliasar. (1989): Unjuk Kerja Lulusan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Sarjana dan Tenaga yang Makarya dan Mandiri, (makalah) disampaikan dalam Semlok UKL FIP IKIP Padang tanggal 24-25 Februari 1989.

Arikunto, Suharsimi. (1986): Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan: Jakarta : Bina Ilmu.

Depdikbud. (1977):Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Depdikbud: Padang : Kanwil Depdikbud.

_____. (1987): Petunjuk Teknis Program Paket A dan Program Kejar Usaha: Jakarta : Dikluspora.

Faisal, Sanapiah. (1981): Pendidikan Luar Sekolah Dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional: Surabaya : Usaha Nasional.

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia. (1988): Tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang: Jakarta : MPR RI.

Ismail, Latif. (1983): Pengelolaan Tempat dan Kegiatan Belajar PLS: Jakarta : Dikti P2LPTK.

Joesoef, Sulaiman dan Slamet Santoso. (1981): Pendidikan Luar Sekolah: Surabaya : Usaha Nasional.

Kadir, M.Sardjan. (1982): Perencanaan Pendidikan Non Formal: Surabaya : Usaha Nasional.

Kartowardojo, Soekarno. (1986): Dasar-dasar Manajemen: Jakarta : Miswar.

Manullang, M. (1986): Dasar-dasar Manajemen: Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mulyadi. (1983): Diagnosis Kebutuhan Belajar Dalam Perencanaan Program PLS: Jakarta : Dikti P2LPTK.

Rakhmat, Jalaluddin. (1986): Psikologi Komunikasi: Bandung : Bina Aksara.

Sarwoto. (1981): Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen : Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang P. (1985): Filsafat Administrasi: Jakarta : Gunung Agung.

Sujamto. (1983):Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan: Jakarta : Ghalia Indonesia.

Syafruddin. (1983): Evaluasi Program Pembelajaran Tenaga PLS: Jakarta : Dikti P2LPTK.

Syahril. (1987):Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kurikulum (Suatu Kasus di SPG Negeri I dan SPG Negeri II Padang). Tesis : Padang : Jurusan Administrasi Pendidikan.

Thoha, Miftah. (1983): Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya: Jakarta : Rajawali.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya: Semarang : Bina Ilmu.

Winardi. (1983): Azas-azas Manajemen: Jakarta : Alumni.